

STRATEGI BALIKPAPAN DALAM MENDAPATKAN PENGHARGAAN PROGRAM ASEAN ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE CITIES 2011 – 2014

Hutasoit, Mey Rukun Lamtio Sari¹
Nim. 1302045032

Abstract

ASEAN Environmentally Sustainable Cities is a programme that promotes the development of sustainable with eco-friendly in the ASEAN countries where each country adopted in a national legislations. AESC award is a development of ADIPURA programme level ASEAN starting on October 8, 2008 and is held every 3 years. The city categories are distinguished based on population, to the small town's population up to 750,000 inhabitants and large city population up to 750,001-1.5 million inhabitants. Certificate of AESC Award are given to cities competitively, using 3 key indicators of ASEAN, namely the Clean Air, Clean Water, and Clean Land as assessment.

Keywords: Strategy, Balikpapan, AESC

Pendahuluan

Secara global, untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup, para pemimpin negara – negara di ASEAN sepakat untuk berupaya meningkatkan kerjasama di kawasan ASEAN untuk menjaga kelestarian lingkungan dalam rangka mencapai lingkungan yang bersih dan hijau. Sebagai bentuk komitmen pelestarian lingkungan, Menteri Lingkungan Hidup se – ASEAN mendukung “*ASEAN Environmentally Sustainable Cities (AESC) Programme*” pada 4 Maret 2003 di Siem Reap, Kamboja. Menteri lingkungan ASEAN juga akan memberikan penghargaan kepada 10 kota/kabupaten di ASEAN yang menerapkan program ini sehingga program ini dapat menjadi teladan bagi kota yang belum menerapkan. Di Indonesia, hanya 7 kota yang menerapkan program AESC ini yaitu Palembang, Banjarmasin, Makassar, Surabaya, Jakarta Pusat, Padang, dan Balikpapan.

ASEAN Environmentally Sustainable Cities (AESC) Award merupakan pengembangan dari Program ADIPURA tingkat ASEAN yang dimulai pada tanggal 8 Oktober 2008 dan diadakan setiap 3 tahun sekali. Kategori kota dibedakan berdasarkan jumlah penduduk, untuk kota kecil populasi sampai 750.000 jiwa dan kota besar populasi sampai dengan 750.001- 1.500.000 jiwa. Sertifikat AESC Award diberikan kepada kota-kota menggunakan indikator kunci ASEAN yaitu *Clean Air*, *Clean Water*, dan *Clean Land* sebagai penilaian

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : meii_moyy@yahoo.co.id

Tabel 1.1 : Indikator AESC *clean air, clean water, cleand land*

a. Clean Air

o.	Indikator
.	Jumlah hari dalam setahun bahwa standar indeks polutan (PSI) melebihi 100 ('tidak sehat') menggunakan standar USEPA
.	Jumlah hari dalam setahun 4 tingkat kunci parameter ambient (CO, SO₂, NO₂, PM₁₀) melebihi kualitas standar udara USEPA.
.	Jumlah hari dalam setahun untuk tingkat CO
.	Jumlah hari dalam setahun untuk tingkat SO ₂
.	Jumlah hari dalam setahun untuk tingkat NO ₂
.	Jumlah hari dalam setahun untuk tingkat PM ₁₀
.	Kendaraan berbahan bakar bensin dan solar % selama pemeriksaan di pinggir jalan memenuhi standar Kota / Nasional
.	Kendaraan berbahan bakar bensin % yang dijumpai memenuhi standar Kota / Nasional
.	Kendaraan berbahan bakar solar % yang dijumpai memenuhi standar Kota / Nasional
.	Industri % yang memenuhi persyaratan standar Nasional
.	% Dari bahan bakar alternatif telah digunakan

b. Clean Water

o.	Indikator
.	% Rumah tangga dengan akses terhadap infrastruktur air minum
.	% Rumah tangga dengan air keran yang dijumpai WHO (World Health Organization) memenuhi standar air minum
.	% Rumah tangga dengan industri yang terhubung dengan sistem drainase atau setara dimana dilepaskan memenuhi standar nasional.
.	Kapasitas % di kota dalam memasok air untuk memenuhi konsumsi rata-rata
.	% Ketersediaannya air tawar dari tanah dan permukaan air yang di ekstraksi untuk digunakan
.	% Sekolah di semua tingkat dengan program pendidikan konservasi air

c. Clean Land

o.	Indikator
.	% Sampah di sumber yang disimpan dalam didedikasikan memegang daerah / wadah yang sebelum segera dibuang
.	% Limbah dikumpulkan dari pintu ke pintu / tempat pengumpulan
.	% Limbah diangkut ke dalam kendaraan tertutup secara harian
.	Tingkat keseluruhan daur ulang (% daur ulang limbah dari seluruh orang)

Strategi Balikpapan Mendapatkan Penghargaan AESC (Hutasoit, MeyRukun LS)

.	% Penurunan total limbah dihasilkan dalam setahun
.	% Area hijau dari total luas kota
.	% daerah yang telah sesuai ditetapkan rencana tata ruang kota

Sumber: ASEAN COOPERATION ON ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLES CITIES 2015, <http://hls-esc.org/documents/6hlsesc/PL06%20-%20ASEAN%20Secretariat.pdf>

Melalui Program AESC ini, Balikpapan berkeinginan untuk meraih penghargaan 3 kategori di mulai dengan strategi yang dilakukan pada tahun 2008 hingga 2011. Namun Pada saat itu Balikpapan hanya berhasil meraih predikat kedua terbaik. Penghargaan kategori tersebut diperoleh atas apresiasi komitmen pemerintah terhadap peraturan terkait tata ruang di Balikpapan. Terutama penyediaan lahan hutan lindung. Rizal Effendi selaku walikota Balikpapan menetapkan proporsi lahan hutan lindung dalam peraturan pemerintah, yakni 52% wilayah Balikpapan harus disediakan untuk hutan lindung. Sedangkan 45% sisanya digunakan untuk bangunan masyarakat. Melihat hasil dari penilaian yang dilakukan oleh panitia program AESC, semakin mendorong komitmen Balikpapan untuk menargetkan sasaran dalam meraih penghargaan 3 kategori. Melalui strateginya, Balikpapan menekankan kerjasama dengan masyarakat maupun para *stakeholder*. Hasilnya, Balikpapan mampu mendapatkan penghargaan sebagai Kota terbersih se Asia Tenggara pada tanggal 30 oktober 2014 di Loa Plaza Hotel, Laos. Balikpapan berhasil meraih 3 kategori sekaligus yaitu kategori *clean land*, karena berhasil mengelola sampah TPA hingga menjadi gas metan, kategori *clean water* direbut karena dinilai berhasil mengelola limbah cair warga pemukiman atas air di Margasari menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan kategori *clean air* karena mampu menjaga hutan kota, hutan mangrove (bakau), hutan lindung yang menghasilkan oksigen untuk udara yang bersih dan aktif melakukan penghijauan.

Keberhasilan Balikpapan dalam mendapatkan penghargaan AESC dengan 3 kategori sekaligus pada tahun 2014 tentunya di dukung oleh strategi. Karena itu penulis ingin meneliti lebih dalam tentang strategi Balikpapan dalam mendapatkan penghargaan program ASEAN *Environmentally Sustainable Cities* tahun 2011 – 2014.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Sustainable development (Pembangunan Berkelanjutan)

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang mensejajarkan dua pandangan/aliran yaitu teori pembangunan (konteks pembangunan) dan keberlanjutan lingkungan (konteks lingkungan). Menurut Emil Salim pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan. Menurutny ini didasari oleh lima ide pokok:

1. Proses pembangunan berlangsung secara berlanjut, terus – menerus dan kontinyu, yang ditopang oleh sumber alam, kualitas lingkungan dan manusia yang juga berkembang secara berlanjut.
2. Sumber alam, terutama udara, air dan tanah memiliki ambang batas, dimana penggunaannya akan menciutkan kuantitas dan kualitasnya.

3. Kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas hidup. Semakin baik kualitas lingkungan, semakin positif pengaruhnya pada kualitas hidup.
4. Pola pembangunan sumber alam saat ini semestinya tidak menutup kemungkinan memilih opsi atau pilihan lain di masa depan.
5. Pembangunan berkelanjutan mengandaikan solidaritas transgenerasi, sehingga kesejahteraan bagi generasi sekarang tidak mengurangi kemungkinan bagi generasi selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraannya pula.

Emil salim mengatakan, dalam mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan, harus menekankan pentingnya segitiga kemitraan antara pemerintah, dunia bisnis dan masyarakat madani dalam hubungan kesetaraan dengan mengindahkan hukum ekonomi, alam – ekologi dan peradaban. Integrasi antara ketiga aspek ekonomi, sosial dan lingkungan ini menjadi faktor kunci dalam kesuksesan melaksanakan pembangunan berkelanjutan.²

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Prinsip – prinsip yang perlu diperhatikan untuk suatu proses pembangunan berkelanjutan yaitu dengan menghormati dan memelihara komunitas kehidupan, memperbaiki kualitas kehidupan manusia, melestarikan daya hidup dan keragaman bumi, menghindari sumber daya alam yang tidak terbaharukan, berusaha tidak melampaui kapasitas yang tidak terbaharukan, mengubah sikap dan gaya hidup orang per orang, mendukung kreatifitas masyarakat untuk memelihara lingkungan sendiri, menyediakan kerangka kerja nasional untuk melakukan upaya pembangunan pelestarian, dan menciptakan kerjasama global.

Pembangunan berkelanjutan dipandang mampu meningkatkan mutu kehidupan, selain itu juga, hal ini dianggap sebagai upaya yang mampu menjadi “jembatan” dalam bertemunya kebutuhan manusia mulai dari masa kini hingga masa yang akan datang. Hubungan antara ekonomi dan sosial juga diharapkan dapat menciptakan hubungan yang adil, hubungan antara ekonomi dan lingkungan diharapkan dapat terus berjalan, sedangkan hubungan antara sosial dan lingkungan bertujuan agar dapat terus bertahan.

Green Policy

Green policy adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh suatu institusi tertentu dengan tujuan melindungi serta melestarikan kehidupan lingkungan hidup dengan cara – cara yang diterapkan oleh instansi tersebut. *Green Policy* merupakan suatu cara yang cukup efektif dalam menanggulangi masalah yang timbul berkaitan dengan lingkungan hidup. Tetapi di dalam *green policy* sendiri terdapat paradigma – paradigma yang sederhana yang wajib untuk dikerjakan. *Recycle* (mendaur ulang), *Reused* (memakai ulang), dan *Reduce* (mengurangi). Bila ketiga paradigma ini diaplikasikan kedalam *green policy* dan dijadikan dasar dari kebijakan tersebut, lingkungan hidup akan mempunyai siklus waktu untuk perputaran lebih teratur.

Menurut pendapat Emil Salim dalam bukunya “*Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*” mengatakan perlu adanya pihak ketiga yang mampu berperan sebagai kekuatan pengimbang. Wujudnya adalah masyarakat warga yang

²Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*, 2010, hlm 12.

bukan berasal dan bukan merupakan bagian dari kelompok bisnis swasta, dan juga bukan dari sektor pemerintahan. Adanya peran masyarakat warga, sebagai kekuatan pengimbang dalam segitiga hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat, akan memungkinkan terbentuknya keseimbangan (ekuilibrium) yang dibutuhkan untuk mengembangkan pola pembangunan berkelanjutan dengan tiga jalurnya: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini diterapkan dengan cara membuat kebijakan dan langkah – langkah penting demi penguatan institusi dan peningkatan peran masyarakat di Indonesia melalui dua langkah pendekatan;

1. Dengan merangkul, memberi payung perlindungan hukum dan politik, serta membantu perkembangan organisasi – organisasi nonpemerintah dan/atau LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup, sehingga mampu berperan-serta dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
2. Dengan mendirikan, membantu, dan mendorong proses pembentukan pusat – pusat studi lingkungan (PSL) di berbagai universitas negeri dan perguruan tinggi di Indonesia, untuk membangun basis ilmu dan pengetahuan tentang lingkungan, yang diperlukan oleh pemerintah dan masyarakat warga dalam melakukan perubahan paradigma pembangunan maupun advokasi kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan membahas suatu permasalahan dengan cara menggambarkan, meneliti, mengolah data, menganalisis, menginterpretasikan hal yang ditulis dengan pembahasan yang teratur dan sistematis sesuai fakta yang terjadi. Jenis dan sumber data yang disajikan adalah data primer dan sekunder, dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh penulis dari telaah pustaka baik dari buku-buku, akses internet dan website yang dinilai sesuai dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data Untuk memperoleh data-data yang akurat seputar topik penelitian yang disingkat dalam proposal ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) dengan mencari dan mengumpulkan data-data sekunder yang bersumber dari buku-buku, data online dan referensi lainnya untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif dan eksplanatif dengan menjelaskan dan menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya yang memiliki hubungan saling keterkaitan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

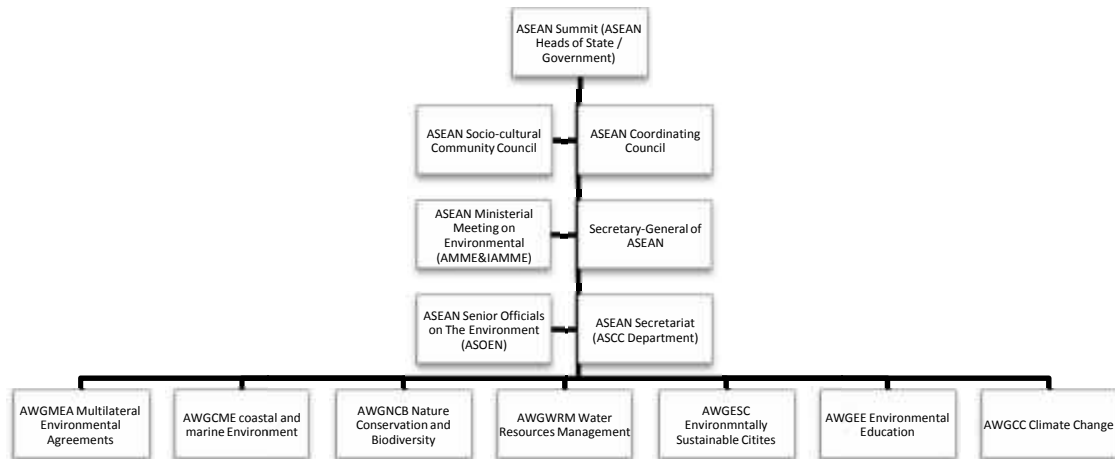
Hasil Penelitian

Seiring dengan makin luasnya permasalahan lingkungan di kawasan, *The ASEAN Senior Officials on the Environment* (ASOEN) sepakat memenuhi pertemuan setiap tahun untuk mendukung Menteri Lingkungan ASEAN dalam hal penyusunan, implementasi dan pemantauan program – program dan kegiatan regional. ASOEN terdiri dari kepala Departemen/jurusan/lembaga lingkungan yang bertanggung jawab mengatasi masalah lingkungan di negara mereka masing – masing. Anggota ASOEN juga berfungsi sebagai titik fokus ASOEN nasional untuk mempromosikan kegiatan ASEAN di masing – masing negara.

Pada 4 maret 2003, ASEAN membentuk *ASEAN Working Group on Environmentally sustainable Cities* (AWGESC) di Siem Reap, Kamboja dimana pertemuan ASEAN

tersebut membahas isu – isu penting yang perlu di tindaklanjuti salah satunya menyepakati indikator lingkungan untuk *clean air*, *clean water*, dan *clean land*. AWGESC merupakan *subsidiary bodies* dari ASOEN. Pertemuan ini merupakan rangkaian dari pertemuan internasional untuk merumuskan upaya pengendalian lingkungan secara menyeluruh. Hasil dari pertemuan kemudian dibawa ke pertemuan tingkat Menteri negara – negara ASEAN.

Gambar 5: ASEAN Institutional Framework for Environmental Cooperation



Sumber: Fourth ASEAN State of the Environment Report 2009

AESC merupakan sebuah program yang mempromosikan pembangunan kota berkelanjutan yang ramah lingkungan di negara – negara ASEAN dimana masing – masing negara mengadopsi dalam undang – undang nasionalnya. Indonesia sendiri sebagai salah satu negara yang mengikuti program AESC mengacu pada UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan Pemerintah nasional dan Pemerintah Daerah membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam suatu pembangunan wilayah. Hasil KLHS menjadi dasar bagi Pemerintah maupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan suatu kebijakan, rencana maupun program. KLHS memuat kajian antara lain:

- Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
- Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup
- Kinerja layanan/jasa ekosistem
- Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam
- Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan
- Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pada kesempatan itu pula, Indonesia mengusulkan pemberian penghargaan kepada kota yang menerapkan program AESC dengan mengacu pada program Adipura. Penghargaan ESC Award pertama kali diberikan kepada 10 kota dari 10 negara ASEAN pada tahun 2008 di Vietnam. Terdapat dua jenis penghargaan, yaitu piala yang diberikan kepada 10 kota dari 10 negara ASEAN dengan kriteria yang sama dan penghargaan Piagam (*Certificate of Recognition*) yang diberikan kepada 6 kota yang memenuhi kriteria *clean air*, *clean water* dan *clean land*. Pemberian penghargaan AESC ke – 2 diadakan di Bali, pada tanggal 23 November 2011. Untuk pertama

kalinya juga pemberian penghargaan ke enam kota di pilih secara kompetitif. Kota kecil populasinya dipilih sampai 750.000 jiwa dan kota besar populasinya dipilih dari 750.000 – 1.500.000 jiwa. Selanjutnya Menteri lingkungan ASEAN memberikan penghargaan AESC yang ke – 3 pada tanggal 30 Oktober 2014 di Vientiane, Lao PDR. Berikut kota – kota penerima penghargaan AESC:

Tabel 3.4 : Kota – kota penerima *Environmentally Sustainable City* (AESC)

Negara	Kota		
	2008	2011	2014
Brunei Darussalam	Temburong	National Housing Scheme Rimba	Bandar Seri Begawan
Cambodia	Phnom penh	Phnom Penh	Battambang Municipality
Indonesia	Palembang	Surabaya	Balikpapan
Lao PDR	Luang Prabang	Xamneau	Luang Prabang
Malaysia	North Kuching City Hall	Perbadanan Putrajaya	Melaka
Myanmar	Taungyi	Pyin Oo Lwin	Yangon
Philippines	Puerto Princesa	Puerto Princesa	San Carlos
Siangapore	South West Community Development Council	South West Community Development Council	North West District
Thailand	Bangkok	Phuket	Chiang Rai City
Viet nam	Ha Long	Danang	Hue City

Kota – kota penerima *certificate of recognition* (2011)

Kota	Negara	Kategori
Tangerang	Indonesia	Clean Air for Big Cities
Da Lat City	Vietnam	Clean air for Small Cities
Phnom Penh	Cambodia	Clean Water for Big Cities

Nakhon Sawon	Thailand	Clean Water for Small Cities
Davao City	Philippines	Clean Land for Big Cities
Roi-et	Thailand	Clean Land for Small Cities

Kota – kota penerima *sertificate of recognition* ke – 2 (2014)

Kota	Negara	Kategori
Tangerang	Indonesia	Clean Air for Big Cities
Da Lat City	Vietnam	Clean Air for Small Cities
Phnom Penh	Cambodia	Clean Water for Big Cities
Nakhon Sawan	Thailand	Clean Water for Small Cities
Davao City	Phillipines	Cleand Land for Big Cities
Roi-et	Thailand	Clean Land for Small Cities

Sumber: [http://environment.asean.org/wp-content/uploads/2015/06/Fourth ASEAN-State-of-the-Environment-Report-2009.pdf](http://environment.asean.org/wp-content/uploads/2015/06/Fourth-ASEAN-State-of-the-Environment-Report-2009.pdf)

Untuk mendapatkan penghargaan program ASEAN *Environmentally Sustainable City*, Balikpapan membuat sebuah kebijakan yang berlandaskan pada konsep pembangunan berkelanjutan dan teori *green policy*. Kebijakan ini menjadi acuan Pemerintah dalam program AESC, sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kota Balikpapan.
- b. Pembagian blok pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain sesuai dengan UU No.26 Tahun 2008 tentang peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung.
- c. Mengeluarkan Keputusan Walikota Balikpapan No.1 tahun 2008 tentang Kewajiban penanaman, pemeliharaan dan perawatan pohon/vegetasi dan penyediaan prasarana lingkungan (drainase/bozem) di Kota Balikpapan.
- d. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Untuk mencapai target dalam mendapatkan penghargaan program AESC berdasarkan Kebijakan Lingkungan Balikpapan yang telah di muat sebelumnya, upaya dari kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeliharaan dan pengawasan Hutan Kota/RTH yang ada.
- b. Melakukan upaya pemulihan dan merehabilitasi kawasan hutan dan mangrove.
- c. Memberikan pendanaan dari pihak lain dalam perlindungan SDA dan keanekaragaman hayati.
- d. Melibatkan masyarakat dalam pelestarian Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- e. Melakukan kerjasama dengan multi *stakeholder* dalam pelaksanaan program
- f. Menyediakan sarana dan prasarana persampahan.
- g. Mensosialisasikan Bank Sampah dan Rumah Kompos.
- h. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan 3R (*reduce, reuse, recycle*).

- i. Melibatkan LSM, akademisi dan komunitas lingkungan dalam sosialisasi 3R.
- j. Memberikan pelayanan perijinan lingkungan integrative dan terpadu.
- k. Membuat tim pengawasan lingkungan yang terpadu.
- l. Memberikan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.
- m. Menjaga dan Pemeliharaan RTH / Hutan Kota disetiap Tahunnya dengan mengupah/menggaji warga setempat;
- n. Melakukan kerjasama dengan CSR perusahaan untuk ikut melakukan pengelolaan RTH/Hutan Kota.

Program AESC ini telah memotivasi Balikpapan agar mendapatkan penghargaan 3 kategori sekaligus yaitu clean land, clean air dan clean water. Melalui kebijakan dan upaya yang telah ditetapkan Balikpapan, Hasilnya pada tahun 2011 Balikpapan hanya memperoleh 1 kategori ESC Award di Kota Myanmar sebagai The second award setelah Thailand dengan kategori clean land. Penilaian dari ASEAN tersebut karena Balikpapan mampu mengolah sampah TPA menjadi gas methan.

Dari hasil analisis terhadap isu-isu internal dan eksternal dalam pembangunan Lingkungan Hidup di Kota Balikpapan, selanjutnya dikelompokkan ke dalam 8 isu strategis yang menjadi acuan pemerintah Balikpapan untuk mencapai sasaran yakni mendapatkan penghargaan 3 kategori sekaligus. Sebagai berikut :

1. Pemerintah Balikpapan gagal dalam mencapai sasaran memenangkan 3 kategori sekaligus, yakni belum memenangkan kategori *clean air* dan *clean water*.
2. Belum optimalnya perlindungan Sumber Daya Alam, terutama pada upaya pembebasan lahan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan air baku.
3. Kurangnya pengawasan Badan Lingkungan Hidup (BLH) terhadap pelaporan swapantau usaha atau kegiatan yang menjadi komitmen dalam dokumen lingkungan agar ditaati dan dilaksanakan.
4. Batasan pada peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang kewenangan Pengelolaan Hutan Lindung di tingkat Provinsi.
5. Meningkatnya fenomena perubahan iklim yang berimbas pada meningkatnya bencana Banjir, tanah longsor, kekeringan dan penurunan kualitas lingkungan.
6. Meningkatnya timbunan sampah dan belum optimalnya pengelolaan sampah dengan pola 3R.
7. Pencemaran Air, Udara, dan Tanah oleh pelaku usaha/kegiatan.
8. Belum optimalnya penggunaan sistem informasi lingkungan, pengawasan, pengendalian dan belum efektifnya penaatan Hukum Lingkungan.

Strategi Balikpapan dalam mendapatkan penghargaan program ASEAN Environmentally Sustainable Cities 2011-2014

Sebagai kota besar yang terus berkembang, Balikpapan masih belum dapat menyelesaikan permasalahan lingkungannya. Sebagai bentuk komitmen besar yang dimiliki, Balikpapan semakin gencar untuk mewujudkan kota yang ramah lingkungan dengan mengusulkan untuk kembali mengikuti program AESC dalam mencapai target memenangkan 3 indikator sekaligus, yakni *Clean air*, *Clean water*, dan *Clean land* di tahun 2014. Dalam mewujudkan target tersebut ditambah dengan belum maksimalnya upaya yg dilakukan sebelumnya, maka dari tahun 2011 – 2014 Balikpapan meningkatkan strateginya untuk mencapai target sasaran, yaitu:

1. Integrasi kebijakan dan program AESC pada setiap tingkatan di Balikpapan dilakukan melalui upaya:
 - a) Koordinasi penilaian kota sehat / Adipura melalui program *Green Education* dan program Adiwiyata yaitu kebijakan paradigma proses belajar mengajar diluar kelas sebanyak 70% dan 30% didalam kelas.
 - b) Pengembangan model pasar induk untuk edukasi lingkungan hidup melalui gerakan kebersihan pasar yang diselenggarakan oleh Dinas Pasar bersama Dinas Kesehatan dengan memberikan predikat pasar sehat di pasar Pandansari.
 - c) Model terminal sebagai sarana edukasi lingkungan hidup memfasilitasi sarana dan prasarana. Dalam rangka mewujudkan bandara aman, nyaman dan sehat maka dibentuk forum bandara sehat yakni PT Angkasa Pura sebagai pengelola sarana dan prasarana penyelenggara transportasi udara yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Balikpapan dan Kepala Badan Lingkungan Hidup.
 - d) Pengukuran kualitas udara ambien dilakukan pada beberapa titik lokasi yang strategis dengan pengukuran secara sesaat dilakukan pada jalan raya dengan kategori padat lalu lintas, pada daerah perdagangan, daerah dekat permukiman dan daerah dekat industri. Sedangkan pengukuran secara terus menerus menggunakan Air Quality Monitoring System (AQMS) yang terpasang pada tepi jalan raya yang padat lalu lintas, pada kawasan perdagangan dan pada pemukiman. Titik lokasi tersebut yakni Simpang Balikpapan Plaza Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Klandasan Ilir pada titik koordinat S : 01°16'37,3 dan E : 116°50'17,6 , yang merupakan pengukuran pada jalan raya (5 m dari tepi jalan), Kantor Kelurahan Karang Joang , Kelurahan Karang Joang: pada titik koordinat S : 01°10'44,17 dan E : 116°52'51,38 , yang merupakan daerah permukiman Perdagangan dan Jasa, dan Pelabuhan Laut Semayang di Kelurahan Prapatan, pada titik koordinat S : 01°16'15,7 dan E : 116°48'28,6 , yang merupakan daerah Jasa dalam hal pelayanan Jasa Transportasi Laut.
 - e) Penanganan lahan kritis atau lahan tidak produktif dengan kegiatan penghijauan berupa penanaman pohon dan pemeliharannya yang dilaksanakan mulai tahun 2012 di kawasan mangrove dan kawasan bendali secara berkelanjutan. Selain itu Balikpapan bekerjasama dengan aparat TNI melalui Dinas Pertanian dan Perikanan mengembangkan penanaman padi di lahan kering milik masyarakat seluan 40 ha.
 - f) Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi agar masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.
2. Intensitas sosialisasi Perwali No 32/2012 huruf a dilakukan dengan upaya:
 - a) Membentuk Pos Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH) sebagai tanggung jawab pemerintah Balikpapan untuk menerima laporan pengaduan dimana telah terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan kewajiban untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dimandatkan oleh berbagai ketentuan Pemerintah yang bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup dan seluruh elemen masyarakat.
 - b) Pembangunan Kebun Raya Balikpapan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 68/ Menhut-II/2009 tentang penetapan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus untuk Hutan Penelitian,

Pengembangan, Pendidikan dan latihan dalam bentuk Kebun Raya Balikpapan di dalam kelompok Hutan Lindung Sungai Wain seluas 309,22 Ha.

3. Peraturan pemerintah No 81 Tahun 2012 melalui upaya
 - a) Mendirikan Bank Sampah dimana Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang mewajibkan produsen melakukan kegiatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Kegiatannya dengan mengumpulkan dan menjual sampah anorganik (logam, plastik, kertas, kardus) dalam bentuk Bank Sampah Salah satunya di terapkan di 59 RT Kelurahan Gunung Bahagia.
 - b) Mendirikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Manggar sebagai sarana pendidikan dan ekowisata melalui program Pengomposan Sampah Berbasis Masyarakat (Pemsamas) dan mendirikan kafe TPA dengan nama "*Caffe Methane*". TPA ini sebagai *pilot project* dirancang untuk menangkap gas metan dan gas penghasil bau. Gas metan dialirkan ke 300 titik untuk 150 rumah tangga disekitar TPA sebagai pengganti LPG dan tidak perlu membayar.
4. Tujuan ditentukan pada tingkat kota Balikpapan sesuai dengan PP No 27 Tahun 1999 pasal 7 ayat 1 dengan pelaksanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan *stakeholder* dengan menganalisis dampak lingkungan melalui upaya:
 - a) Meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam pelestarian hutan lindung, hutan kota, hutan mangrove, kebersihan kota dan pengendalian sampah kota dengan cara pembentukan badan-badan pengelola Kota Balikpapan dimana seluruh elemen masyarakat Kota Balikpapan duduk sebagai anggota termasuk TNI, LSM peduli LH, BUMN, juga dunia usaha / swasta seperti PT.Pertamina, PT. Chevron, PT. Thicss, Inhutani, PDAM, Danramil.
 - b) Membuat izin melakukan usaha atau kegiatan perindustrian yang sekiranya berdampak pada lingkungan untuk menjaga kualitas lingkungan dan pencegahan perusakan lingkungan.
 - c) Pengendalian pengembangan kawasan industri dengan cara membentuk badan pengelola industri terpadu, membentuk komunitas masyarakat industri, dan melarang membuka usaha dibidang industri secara perseorangan.
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 – 2016. Upayanya dengan memberlakukan peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Balikpapan tahun 2012 – 2032 dilakukan dengan upaya penataan 52% ruang hijau dan 48% untuk pembangunan. Di Balikpapan terdapat 20 potensi kawasan Ruang Terbuka Hijau atau Hutan Kota yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota yang tersebar di wilayah kecamatan Balikpapan dengan luas Ruang Terbuka Hijau atau Hutan Kota keseluruhan sebesar 349.196 Ha. Kawasan terbangun (48%) merupakan sungai, laut/pantai, pemukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan militer, zona sektoral, zona khusus, dan fasilitas umum. Sedangkan yang termasuk kawasan ruang terbuka hijau (RTH) 52% adalah hutan lindung, kawasan

lindung, hutan mangrove, hutan kota, kawasan sempadan sungai, dan perlindungan alam.

Strategi diatas dibuat selain untuk memenuhi kriteria indikator dalam memperoleh penghargaan AESC, juga untuk mewujudkan Balikpapan sebagai kota ekologis atau ramah lingkungan. Balikpapan melaksanakan kerjasama melalui bentuk kerjasama program lingkungan se-ASEAN yang dikenal dengan nama ASEAN *Environmentally Sustainable City* dimana program ini memberikan penghargaan kepada kota – kota di setiap negara yang mampu memenuhi syarat indikator yakni, *Clean Air, Clean Land, dan Clean Water*. Balikpapan merupakan salah satu kota yang mewakili Indonesia untuk mengikuti Program AESC yang merupakan sebagai tindak lanjut dari ASEAN *Working Group on Environmentally Sustainable City* (AWGESC). Melalui program ASEAN ini, Balikpapan mampu memenuhi syarat indikator dan berhasil mendapatkan penghargaan 1 indikator pada tahun 2011 dan selanjutnya Balikpapan meningkatkan strategi untuk dapat mendapatkan 3 indikator sekaligus pada tahun 2014.

Keberhasilan Balikpapan dalam Memperoleh Penghargaan AESC 2014

Program AESC telah berhasil diterapkan di kota Balikpapan. Hal ini terbukti bahwa pada tanggal 30 oktober 2014 Balikpapan mampu meraih penghargaan sebagai kota terbersih se-ASEAN di ajang ASEAN *Environmentally Sustainable City* (AESC) *Award* 2014, yang berlangsung di Loa Plaza Hotel, Laos. Penghargaan tersebut diraih untuk kategori *clean land, clean water, dan clean air*. Kebersihan merupakan aspek yang sangat diperhatikan agar kota Balikpapan mampu menopang kebutuhan masyarakat setempat dan mendorong fungsi daya dukung lingkungan hidup. Prestasi yang diraih kota Balikpapan merupakan hasil dari kerjasama antara pemerintah kota dengan para *stakeholder* dan masyarakat.

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi Balikpapan dalam mendapatkan program AESC telah berjalan dengan baik. Dalam upaya pencapaian ASEAN *Environmentally Sustainable Cities* Balikpapan sudah memenuhi kriteria – kriteria baik secara teoritik maupun prakteknya, mengingat sinergi antara Pemerintah Balikpapan, masyarakat, maupun seluruh komponen – komponen yang melaksanakan kebijakan secara tegas, mampu meningkatkan kesadaran dan komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi dalam menjalankan pembangunan sekaligus mempertimbangkan lingkungan. Kemudian untuk aspek komunikasi yang dianggap aspek penting maka perlu diketahui komponen audit komunikasi yang berjalan di Balikpapan, hasilnya komponen audit komunikasi sebagian besar dipersepsikan sangat baik, hal ini terbukti dari berbagai penghargaan yang diperoleh Kota Balikpapan sebagai bentuk dari komunikasi antara *stakeholder* dan masyarakat di Kota Balikpapan yang baik. Faktor kepemimpinan, komitmen dan *political will* serta aspek koordinasi dan komunikasi merupakan faktor kunci yang mendorong pencapaian konsep *sustainable city* di Balikpapan.

Para Menteri Lingkungan Hidup ASEAN menilai langsung bahwa Balikpapan telah berhasil dalam mencapai sasaran dan strategi yang mencakup 3 indikator yakni, *clean land, clean water, dan clean air*. Kategori *clean land* karena berhasil mengelola sampah TPA hingga menjadi gas methan, kategori *clean water* direbut karena dinilai berhasil mengelola limbah cair warga pemukiman atas air di Margasari menggunakan

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan kategori *clean air* karena mampu menjaga hutan kota, hutan mangrove (bakau), hutan lindung yang menghasilkan oksigen untuk udara yang bersih dan aktif melakukan penghijauan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang strategi Balikpapan dalam mendapatkan penghargaan ASEAN *Environmentally Sustainable City* dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Strategi yang dilakukan pemerintah Balikpapan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ini adalah dengan memberikan suatu peraturan yang didalamnya mengatur tentang pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan pada lingkungan yang baik. Pemerintah juga melakukan upaya untuk mengelola dan mengawasi agar terpeliharanya keutuhan fungsi tatanan lingkungan.

Kedua, Pembangunan Berkelanjutan merupakan keputusan tepat dalam penyelamatan lingkungan. Konsekuensinya dalam jangka pendek, pertumbuhan ekonomi akan lambat, tetapi dalam jangka panjang akan sejalan dengan kesadaran, akan pentingnya peningkatan kualitas lingkungan, pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.

Ketiga, Balikpapan sebagai salah satu perwakilan Indonesia mengikuti program ASEAN *Environmentally Sustainable City* sejak tahun 2008 dan mulai mendapatkan *Award* pada tahun 2011 dan 2014. Pemerintah Indonesia maupun program ASEAN ini mengacu pada UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan Pemerintah nasional dan Pemerintah Daerah membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam suatu pembangunan wilayah.

Keempat, strategi yang telah di implementasikan adalah dengan mensosialisasikan perda dan pembinaan terhadap seluruh masyarakat agar lebih berkualitas. Faktor penting yang mendukung keberhasilan program ASEAN *Environmentally Sustainable City* adalah pelopor, kemantapan organisasi, kemitraan, kebijakan, peran serta masyarakat, media motivator. Poin terakhir dalam penelitian ini, dari hasil analisa dan pengukuran pencapaian target 2011 – 2014, Balikpapan telah berhasil mencapai sasaran program dari AESC karena seluruh indikator bekerja maksimal untuk mencapai sasaran. Beberapa indikator kinerja bahkan telah mampu mencapai target lebih dari 100%

Daftar Pustaka

Buku

Acelandu, M.I ; Grecu, E. 2014. *Green jobs in the actual employment policies for a sustainable economic development. In Proceedings of the Energy and Environment Knowledge Week*. Toledo, Spain.

Emil Salim. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*.

Internet

2nd ASEAN Environmentally Sustainable Cities.
<http://environment.asean.org/recipients-of-asean-esc-award-2011/>.

Administratif Balikpapan. Tersedia di [http://dlh.balikpapan.go.id/assets/filedownload/DIKPLHD Kota Balikpapan 2016.pdf](http://dlh.balikpapan.go.id/assets/filedownload/DIKPLHD_Kota_Balikpapan_2016.pdf)

ASEAN COOPERATION ON ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLES CITIES 2015. Tersedia di <http://hls-esc.org/documents/6hlsesc/PL06%20-%20ASEAN%20Secretariat.pdf>.

ASEAN Institutional Framework for Environmental Cooperation. Tersedia di Fourth ASEAN State of the Environment Report 2009.

ASEAN Award. Tersedia di <http://environment.asean.org/wp-content/uploads/2015/06/Fourth> ASEAN-State-of-the-Environment-Report-2009.pdf

Balikpapan Raih Penghargaan Kota Bersih se-ASEAN. Terdapat di <http://m.metronews.com/read/2014/11/03/313664/>.

Dokumen Informasi Kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup daerah Kota Balikpapan tersedia di [http://dlh.balikpapan.go.id/assets/filedownload/DIKPLHD Kota Balikpapan 2016.pdf](http://dlh.balikpapan.go.id/assets/filedownload/DIKPLHD_Kota_Balikpapan_2016.pdf).

Gary P. Sampson, "The Green Economy and Environmental Governance", UNEP. Tersedia di <http://www.unep.org/delc/Portals/24151/GreenEconomyInternationaleG.pdf>

Program bersih ala walikota balikpapan Rizal Effendi. Tersedia di <http://www2.jawapos.com/baca/artikel/13090/>.

Kantor Kesehatan Pelabuhan bekerjasama dengan PT Angkasa Pura I Persero gelar sosialisasi dan pembentukan forum Bandara Sehat. Tersedia di <https://www.sepinggan-airport.com/id/berita/index/kantor-kesehatan-pelabuhan-bekerjasama-pt-angkasa-pura-i-persero-gelar-sosialisasi-dan-pembentukan-forum-bandara-sehat-1>.

Mengejar Impian Mewujudkan Balikpapan Kota Ekologis, tersedia di Balikpapanekologis.pdf

Rapat Koordinasi Nasional Program ADIPURA. Tersedia di <http://www.menlh.go.id/sp-rapat-koordinasi-nasional-program-adipura/>,

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan 2016-2021. Tersedia di dlh.balikpapan.go.id.pdf